

BAB I

A. Latar Belakang

Konflik antara Rusia dan Ukraina sudah terjadi sejak tahun 2013 dalam berbagai bentuk. Bentuk konflik tersebut antara lain perbedaan afiliasi politik, perebutan teritorial strategis, dan isu perluasan NATO. Afiliasi politik berkenaan dengan perbedaan aspirasi antara pemimpin dan sebagian rakyat Ukraina. Dalam hal ini, Presiden Victor Yanukovich cenderung pro-Rusia, sedangkan sebagian rakyat menghendaki agar Ukraina lebih pro-Barat. Hal tersebut terjadi saat Ukraina mengalami krisis ekonomi pada tahun 2013. Saat itu Presiden Victor Yanukovich menolak perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa karena dia lebih memilih bantuan ekonomi dari Federasi Rusia sebesar \$15 miliar AS dan potongan harga gas sebesar 30%. Sikap tersebut mendapatkan protes besar-besaran dari masyarakat Ukraina yang pro Barat. Protes tersebut berlangsung sepanjang tahun 2014 (Atok, 2022). Adanya protes dari sebagian rakyat Ukraina tersebut menyebabkan Presiden Victor Yanukovich mundur dan melarikan diri ke Rusia, dan jabatannya digantikan sementara oleh Presiden Olexander yang merupakan perdana menteri pro Barat. Pergantian tersebut memunculkan perebutan teritorial strategis intervensi militer di Ukraina oleh Rusia, karena tidak ingin mengakui pemerintahan yang pro Barat. Intervensi militer Rusia di Ukraina terjadi pada 18 Maret 2014, yang mana Rusia menduduki wilayah Ukraina termasuk Krimea dengan ancaman kekuatan bersenjata. Rusia menduduki wilayah Krimea karena masyarakat di wilayah tersebut masyarakatnya pro Rusia dibanding Barat. Gerakan dari Rusia ini memaksa Krimea untuk mengeluarkan referendum untuk memisahkan diri dari Ukraina, yang mengeluarkan keputusan rakyat yang ingin lepas dari Ukraina (Widiasa, 2018). Intervensi militer dari Rusia ini membuat Ukraina mencari perlindungan dengan negara lain seperti negara-negara Barat. Hal ini diwujudkan dengan adanya penggantian oleh Presiden Petro Poroshenco tahun 2015, yang kemudian membuat pemerintah baru yang lebih pro Barat. Kemudian muncul keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO (Atok, 2022). Dengan demikian, konflik antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung hampir dua dekade tersebut cukup kompleks karena meliputi berbagai isu keamanan dan strategis.

Sejumlah peneliti sebelumnya telah mengamati konflik antara Rusia-Ukraina pada tahun 2013. Tiga diantaranya yaitu pertama “Analisis Konflik Rusia dan Ukraina (Studi Kepustakaan Status Kepemilikan Krimea)” oleh Fransiskus Atok, menjelaskan mengenai alasan terjadinya konflik Rusia-Ukraina tahun 2013. Di mana terjadinya perbedaan pendapat antara pemimpin Ukraina yang pro Rusia dengan sebagian rakyat Ukraina yang pro Barat. Adanya perbedaan pendapat ini mengakibatkan kestabilan politik Ukraina semakin menurun, yang ditandai dengan Presiden Viktor Yanukovich menghilang dan digantikan oleh Perdana Menteri Olexander yang pro Barat (Atok, 2022). Hal tersebut membuat Rusia merasa terancam, yang kemudian melakukan intervensi militer ke Ukraina dengan menduduki Krimea pada tahun 2014, yang telah dijelaskan pada penelitian kedua yaitu “Bingkai Identitas dalam Konflik Geopolitik : Intervensi Militer Rusia di Ukraina” oleh Rizky Widiasta (Widiasta, 2018). Intervensi yang dilakukan Rusia ini membuat Ukraina mencari perlindungan dengan mendekati diri dengan negara-negara NATO. Yang telah dibahas dalam penelitian “Reaksi Ofensif Rusia dalam Menghadapi NATO Pasca Konflik Krimea Tahun 2014-2017 oleh Syafitri Ramadhani (Ramadhani, 2019). Ketiga penelitian tersebut membahas mengenai konflik antara Rusia dengan Ukraina, di mana pembahasan tersebut sama dengan yang akan saya bahas. Namun, terdapat perbedaan mengenai tahun terjadinya konflik. Ketiga penelitian tersebut membahas mengenai konflik Rusia-Ukraina tahun 2014. Sementara, penelitian ini akan membahas mengenai konflik Rusia-Ukraina tahun 2022-2023.

Konflik Rusia-Ukraina ini kembali memuncak pada Februari 2022. Konflik ini mengakibatkan beberapa situasi yang cukup menegangkan. Situasi tersebut yaitu ketidakinginan Rusia menarik pasukannya, adanya proses penyelesaian konflik, dan adanya sanksi yang diberikan Amerika Serikat kepada Rusia. Keengganan Rusia untuk menarik pasukannya dari Ukraina dikarenakan Rusia tidak ingin Ukraina bergabung dengan NATO, secara hubungan antara Rusia dan NATO ini kurang baik. Terlebih lagi Ukraina dan Rusia ini merupakan negara yang berasal dari satu wilayah bagian Uni Soviet, dan Ukraina ini merupakan *buffer zone* bagi Rusia. Di mana letak geografis Ukraina berdekatan dengan Rusia, serta Ukraina ini menjadi wilayah penyanggah antara Rusia dengan negara-negara di Eropa Timur. Sedangkan hampir seluruh negara di Eropa Timur telah bergabung dengan Uni Eropa dan juga NATO (Najmi & Lestyaningsih, 2022).

Untuk menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina tersebut, telah dilakukan beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut yaitu negosiasi, *good offices*, pendekatan organisasi internasional, dan mediasi. Langkah negosiasi, di mana dalam proses tersebut Presiden Ukraina menyatakan untuk tidak bergabung dengan NATO dalam waktu dekat, dan menyatakan bahwa aliansi mereka tidak akan terlibat dalam konflik ini, sehingga aliansi Ukraina tidak ingin melakukan konfrontasi dengan Rusia. Langkah *good offices* yang merupakan salah satu cara penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga untuk memfasilitasi pertemuan antar pihak. Dalam proses ini Turki menjadi pihak ketiga yang menawarkan tempat untuk pertemuan Rusia dan Ukraina pada 10 Maret 2022. Langkah pendekatan organisasi internasional, di mana Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB pada 2 Maret 2022 untuk mengesahkan Draf Resolusi yang meminta Rusia untuk menarik pasukan militernya serta menghentikan tindakan militer di Ukraina. Dan langkah mediasi, di mana penyelesaiannya melalui pihak ketiga yang disebut mediator. Dalam mediasi ini terlibat empat mediator yaitu Turki, Israel, China, dan Indonesia (Berthanila, 2022). Namun, upaya-upaya tersebut masih belum berhasil menghentikan aksi militer Rusia. kemudian Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan embargo kepada Rusia.

Kegagalan tersebut menyebabkan Amerika Serikat memberikan reaksi keras berupa embargo terhadap Rusia. Adanya embargo ini bertujuan untuk memberi pengaruh dari agresivitas Rusia dengan memberikan tekanan. Di mana Amerika Serikat mengembargo barang ekspor dan impor baik barang teknologi, maupun minyak, serta kebutuhan pokok. Amerika Serikat juga membatasi Rusia dalam melakukan perdagangan global, dan Amerika Serikat melakukan pembekuan investasi kepada Rusia. Serta Amerika Serikat juga melakukan pemblokiran terhadap semua bank dan sistem penggunaan Rubel Rusia dalam SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) (Zulfa et al., 2022). Dengan demikian, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022 ini mengakibatkan Amerika Serikat memberikan embargo kepada Rusia yang mempengaruhi kekuatan negaranya.

Sejumlah peneliti sebelumnya telah membahas mengenai upaya penyelesaian konflik serta embargo yang diberikan kepada Rusia. Tiga di antaranya yaitu pertama, “Peran PBB dalam Penyelesaian Konflik Rusia dengan Ukraina” oleh Putri Permata A Harahap, Siti Zahra Siagian, Seevaira Chyta Simanullang, Victoria Grace Daily, Yuli Indriani Lubis, dan Yeni Yolanda Simbolon. Dalam penelitian tersebut dijelaskan

bahwa penyelesaian konflik Rusia-Ukraina tahun 2014, terdapat peran PBB dalam penyelesaian konflik tersebut, di mana Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi S/2014/189 yang berisi penolakan pengesahan referendum terkait dengan wilayah Krimea, dan menetapkan bahwa Krimea tetap menjadi bagian dari Ukraina. Namun Rusia menolak adanya keputusan dari PBB (Permata Harahap et al., 2023). Kedua yaitu “Analisis Keputusan Amerika Serikat dalam Mengeluarkan Kebijakan *Countering America’s Adverseries Through Sanctions Act* (CAATSA) Terhadap Rusia” oleh Jihan Annisa Fortunada, Mala Mardialina, dan Khairur Rizki. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Amerika Serikat mengesahkan kebijakan *Countering America’s Adverseries Through Sanctions Act* (CAATSA). Sanksi CAATSA yang dijatuhkan kepada Rusia diberikan *tagline* “*Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017*” (CRIEEA). Di mana sanksi tersebut berupa larangan terkait keamanan dunia maya, proyek minyak mentah, lembaga keuangan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, penghindaran sanksi, transaksi dengan sektor pertahanan atau intelijen Rusia, pipa ekspor, privatisasi aset negara oleh pemerintah, dan transfer senjata ke Suriah (Fortunada et al., 2021). Dan ketiga yaitu “Embargo Ekonomi sebagai Strategi Konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia pada Masa Konflik Ukraina 2013-2015 oleh Ummu Ro’iyatu Nahdliyat Millati Hanifah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Rusia tidak hanya mendapat embargo dari Amerika Serikat, namun juga dari Uni Eropa. Di mana Uni Eropa membatasi akses bank Pemerintah Rusia, tidak memberikan kredit pada perusahaan besar minyak dan gas Rusia, serta memutus hubungan kerja sama dengan perusahaan penerbangan *United Airport Corporation* serta perusahaan senjata Kalashnikov (Ro’iyatu Nahdliyat & Hanifah, 2017). Penelitian-penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan dibahas karena menyangkut pembahasan mengenai konflik Rusia dengan Ukraina. Namun, terdapat perbedaan tahun yang dibahas, di mana dalam penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai konflik Rusia-Ukraina tahun 2013-2015. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai konflik Rusia-Ukraina tahun 2022-2023.

Kebijakan embargo oleh Amerika Serikat berdampak pada Rusia. Embargo ini sangat berdampak pada bidang ekonomi dan juga politik. Di mana di bidang ekonomi, mengakibatkan menurunnya mata uang Rusia karena Amerika Serikat memblokir bank dan sistem penggunaan Rubel Rusia dalam SWIFT. Serta mengakibatkan penurunan angka ekspor energi Rusia ke negara lain khususnya negara-negara Barat yang

berpotensi menyebabkan inflasi dan devaluasi. Karena seperti yang diketahui bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa merupakan negara utama dari ekspor energi Rusia (Pamungkas et al., 2022). Selain berdampak di bidang ekonomi, embargo ini juga berdampak pada bidang politik. Di mana hubungan kerja sama Rusia dengan beberapa negara menjadi terganggu khususnya dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dampak tersebut sangat dirasakan pada hubungan kerja sama dalam kegiatan ekspor impor antara Rusia dan Amerika Serikat. Di mana Amerika Serikat menurunkan ekspor kebutuhan pokok ke Rusia (Bramastya & Batan, 2022). Untuk mengurangi dampak yang mungkin akan semakin besar kedepannya akibat embargo dari Amerika Serikat, akhirnya Rusia membuat strategi ekonomi politik berupa kebijakan yang cukup serius. Strategi yang dibuat oleh Rusia ini dalam bentuk kebijakan yaitu *retaliasi*, *capital control*, *import substitution*, dan mencari mitra kerja baru. Dan memang kebijakan ini berfokus pada ekonomi-politik yang sangat berdampak akibat adanya embargo tersebut (Pane & Sinambela, 2023). Oleh karena itu, kebijakan ekonomi-politik tersebut dibuat oleh Rusia menjadi strategi untuk menghadapi embargo Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yang ditujukan untuk mengatasi dampak negatif dari embargo tersebut.

Sejumlah peneliti sebelumnya telah membahas mengenai upaya penyelesaian konflik serta embargo yang diberikan kepada Rusia. Tiga di antaranya yaitu pertama “Strategi Rusia Menghadapi Embargo AS Pasca Krisis Krimea Tahun 2014” oleh Daru Lestika Susilo Handayani. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Amerika Serikat memberikan embargo ke Rusia berupa larangan visa dan pembekuan aset bagi pejabat dan pengusaha Rusia, serta bagi perusahaan-perusahaan milik Rusia, embargo di sektor financial, industri dan pertahanan Rusia, serta dikeluarkannya Rusia dari keanggotaan G-8 (Handayani, 2015). Kedua yaitu “Amerika Serikat dalam Rivalitas Ukraina-Rusia : Intervensi pada Konflik Krimea dan Laut Azov’ oleh Lingga Ayudhia, Yuniarti, dan Rendy Wirawan. Adanya embargo tersebut justru tidak memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Rusia. Karena Rusia justru membalikkan sanksi yang kemudian diberikan kepada Uni Eropa yang sama-sama memberikan sanksi dengan Amerika Serikat. Sehingga Uni Eropa yang mendapatkan dampak dari sanksi yang diberikan oleh Rusia (Ayudhia & Wirawan, 2022). Ketiga yaitu “Strategi Rusia Menghadapi Embargo AS Pasca Krisis Krimea Tahun 2014” oleh Daru Lestika Susilo Handayani. Meskipun sanksi yang diberikan Amerika Serikat saat konflik 2014 tidak terlalu

berdampak pada Rusia, Rusia tetap menghadapi sanksi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan dalam negerinya, yaitu rencana penggantian Dolar ke Rubel dan Yuan, menutup perusahaan milik Amerika Serikat di Rusia, melarang penggunaan motor roket Rusia oleh Amerika Serikat, melarang kegiatan impor produk pertanian dari Amerika Serikat, menerapkan Rubel sebagai mata uang nasional Krimea, menggunakan UnionPay sebagai pelengkap MasterCard atau Visa, serta menjalin kerja sama dengan beberapa negara seperti Indonesia, China, Kuba, Argentina, Mesir, Iran, Turki, dan Hungaria (Handayani, 2015). Penelitian-penelitian tersebut memiliki topik pembahasan yang sama dengan penelitian ini yaitu mengenai konflik Rusia-Ukraina namun terdapat perbedaan tahun yang mana pada penelitian ini akan membahas konflik yang terjadi pada tahun 2022. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa dampak yang timbul akibat embargo kurang signifikan, sedangkan embargo yang diberikan untuk konflik terbaru ini sangat berdampak bagi Rusia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Rusia dalam menghadapi kebijakan embargo dari Amerika Serikat sehubungan dengan konflik Rusia-Ukraina 2022-2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan strategi ekonomi-politik Rusia terhadap embargo Amerika Serikat pasca konflik Rusia-Ukraina 2022-2023. Selanjutnya secara implisit akan dijelaskan pula alasan Amerika Serikat memberikan embargo terhadap Rusia, serta bagaimana Rusia membuat strategi untuk menghadapi embargo tersebut.

D. Kerangka Teoritik

Untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan diatas, riset ini memanfaatkan dua teori, yaitu :

1. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri memiliki peran dan pengaruh yang cukup besar dalam suatu negara. Hal tersebut dikarenakan politik luar negeri ini berupa kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mempertahankan, mengamankan, serta mencapai suatu kepentingan tertentu. Tujuan nasional yang akan dicapai

melalui politik luar negeri dikaitkan dengan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya. Politik luar negeri suatu negara biasanya mengandung dua unsur saling interaksi, yaitu tetap dan perubahan. Unsur tetap ini biasanya meliputi nilai-nilai serta prinsip-prinsip dasar bernegara yang disepakati, sementara unsur perubahan lebih berkaitan pada strategi, prioritas, dan cara memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Menurut William D. Coplin, terdapat empat determinan politik luar negeri. Pertama, yaitu konteks internasional, yang mana artinya situasi politik internasional yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi perilaku suatu negara. Kedua, yaitu perilaku para pengambil keputusan, yang mana perilaku ini dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan individu-individu dalam pemerintahannya. Ketiga, yaitu kondisi ekonomi dan militer, yang mana kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi interaksi antar negara. Keempat, yaitu politik dalam negeri mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, yang mana situasi politik dalam negeri akan memberikan pengaruh dan perumusan dalam pelaksanaan politik luar negeri (Wahyudi, 2019). Oleh karena itu, politik luar negeri dirasa sangat berpengaruh pada kebijakan suatu negara.

Teori terkait politik luar negeri ini telah dikaji oleh peneliti sebelumnya oleh Muhammad Vano Budi Putra dalam tesis yang berjudul “Analisis Kebijakan *Maximum Pressure* Amerika Serikat Terhadap Iran Periode 2018-2020”, di mana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa strategi Iran dengan melakukan retaliasi dalam menghadapi sanksi dari Amerika Serikat. Pada tahun 2015 adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat yaitu JCPoA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) mengenai restriksi terhadap pengembangan senjata nuklir di negara yang beribukota di Tehran. Melalui kesepakatan tersebut, aktivitas dalam peningkatan uranium Iran dibatasi. Di mana sebanyak 75% sentrifugal milik Iran yang digunakan untuk mengelola uranium dalam intensitas tinggi di nonaktifkan, serta adanya pemangkasan sekitar 98% atau sekitar 300 kg untuk stok uranium Iran. Kemudian pada tahun 2017, Amerika Serikat merasa tidak puas dengan kesepakatan JCPoA karena dianggap hanya menjadi penunda hal yang tidak terhindarkan, sehingga dikhawatirkan Iran dapat kembali membuat nuklir dan membahayakan Amerika Serikat dan sekutunya. Untuk menghindari hal tersebut, Amerika Serikat melakukan penekanan negosiasi ulang dengan Iran terkait provisi

dalam JCPoA, namun Iran menolaknya karena tidak ingin adanya perubahan pada ketentuan JCPoA yang telah ditentukan. Karena adanya penolakan dari Iran, kemudian pada tahun 2018 Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump memutuskan keluar dari JCPoA dan mengeluarkan memorandum presidensial untuk menerapkan kembali sanksi yang sebelumnya diangkat oleh JCPoA serta memberikan tekanan ekonomi kepada Iran. Adanya sanksi dari Amerika Serikat membuat Iran mengeluarkan strategi yaitu retaliasi untuk yang menjadi politik luar negeri Iran dalam meredam dampak sanksi dari Amerika Serikat. Retaliasi yang dilakukan Iran yaitu membangun lebih banyak instalasi IR-6 guna meningkatkan uranium diatas batas stok JCPoA yaitu 3600 kg yang seharusnya hanya 300 kg. Iran juga meningkatkan uraniumnya ke level 4,5%, yang mana artinya Iran dapat memperoleh senjata nuklir hanya dalam waktu kurang dari 12 bulan (Putra, 2021).

Dalam kajian tersebut fokus pada politik luar negeri Iran, sedangkan dalam penelitian ini akan terfokus pada politik luar negeri Rusia yang kemudian menjadi kebijakan luar negerinya sebagai strategi dalam menghadapi embargo dari Amerika Serikat.

2. Aliansi

Aliansi dalam hubungan internasional merupakan suatu perjanjian formal untuk saling memberikan dukungan antara dua negara atau lebih jika terjadi suatu perang, sehingga bisa dikatakan bahwa aliansi ini didasarkan oleh kebijakan terkait keamanan nasional. Aliansi ini terbentuk atas kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk bekerja sama dengan tujuan keamanan negara dari ancaman yang datang dari negara lain. Aliansi ini juga ditujukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan bidang lainnya (Yusardi & Saptatia, 2022). Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi pembentukan aliansi menurut teori Walt. Adapun indikatornya yaitu pertama, ingin melakukan pertimbangan dari negara lain yang mungkin mengancam. Kedua, adanya aliansi ini membuat negara tersebut mendapat keuntungan dalam bidang keamanan. Ketiga, aliansi akan mudah terbentuk jika adanya kesamaan ideologi antar negara (Komalasari, 2022). Sehingga dapat dikatakan bahwa aliansi ini dapat saling menguntungkan bagi negara-negara yang beraliansi khususnya pada saat adanya ancaman dari negara lain.

Teori terkait aliansi ini sudah pernah dikaji dalam jurnal berjudul “Pembentukan Aliansi Keamanan Iran-Rusia” oleh Rizky Widian, Muhammad Rusydi, DR dan Willy Widian. Di mana dalam kajian tersebut dijelaskan adanya aliansi keamanan antara Rusia dengan Iran pada tahun 2015 yang ditandai dengan penandatanganan kerja sama militer. Dalam perjanjian aliansi tersebut, kedua negara melakukan beberapa kerja sama militer, seperti Rusia dan Iran yang menghadang tindakan Amerika Serikat yang menyerang Suriah menggunakan kapal perang, dan menyatakan bahwa akan membantu Suriah untuk menaklukkan Gerakan teroris yang terjadi di Suriah. Selain berpengaruh dalam bidang keamanan, aliansi antara Rusia dan Iran ini juga berpengaruh pada bidang perekonomian. Di mana terjadi peningkatan perdagangan antar kedua negara menjadi \$1,24 miliar pada tahun 2015 dan \$2 miliar pada tahun 2016. Adanya aliansi Iran dan Rusia ini terbentuk karena adanya ancaman yang datang dari Amerika Serikat dan Israel. Di mana Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Iran secara unilateral terkait larangan investasi pada sektor energi Iran. Dan Israel yang ingin mengurangi pengaruh Iran di negara Azerbaijan. Hal tersebut yang membuat Iran membentuk aliansi dengan Rusia untuk mempertahankan kekuatannya untuk melawan ancaman dari Amerika Serikat dan Israel (Widian et al., 2018). Oleh sebab itu, aliansi dapat terbentuk karena adanya ancaman dari negara lain.

Dalam kajian tersebut fokus pada aliansi yang dibentuk oleh Rusia dan Iran karena adanya ancaman dari Amerika Serikat dan Israel. Namun, dalam penelitian ini fokus pada salah satu kebijakan Rusia yang membentuk aliansi dengan China akibat embargo yang diberikan oleh Amerika Serikat.

E. Hipotesis

Adanya embargo dari Amerika Serikat kepada Rusia akibat invasi ke Ukraina tahun 2022, memunculkan strategi ekonomi politik dari Rusia. Strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang dibuat oleh Rusia untuk memulihkan keadaan ekonomi politik Rusia yang menurun akibat embargo dari Amerika Serikat. Strategi Rusia dalam menghadapi embargo yaitu dengan politik luar negeri berupa retaliasi dan penguatan aliansi dengan China.

F. Metode Penelitian

Strategi Ekonomi Politik dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu karena topik konflik antara Rusia dan Ukraina ini sedang menjadi perbincangan hangat di dunia internasional. Dalam konflik ini menarik perhatian beberapa negara, karena menganggap tindakan yang dilakukan Rusia tidak benar dan cukup merugikan Ukraina. Banyak negara yang mendukung Ukraina, sehingga ada beberapa negara yang memberikan sanksi kepada Rusia karena Rusia yang tidak ingin menghentikan tindakannya. Salah satu negara yang memberikan sanksi yaitu Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat mengembargo Rusia baik bank maupun barang-barang ekspor dan impor. Adanya embargo tersebutlah yang menyebabkan adanya strategi ekonomi politik Rusia.

Penelitian ini menggunakan desain umum berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Di mana metode penelitian kualitatif merupakan suatu proses dalam penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi pada manusia ataupun sosial yang disajikan serta dilaporkan dengan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber-sumber. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek yang alamiah, di mana teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan, analisis data yang bersifat induktif, dan hasilnya lebih terfokus pada makna (Prasanti, 2018). Metode penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapat pemahaman dari masalah-masalah yang menjadi topik pembahasan. Karena dalam metode ini menjelaskan fenomena mengenai topik secara detail dan sistematis (Rijal Fadli, 2021).

Data yang digunakan dalam riset ini bersumber dari data sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini bisa didapatkan dari data instansi dan sumber terkait, serta data-data yang telah terdapat dalam penelitian lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa data sekunder berasal dari referensi buku, jurnal penelitian, website, dan sumber lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian (Beno et al., 2022).

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik kepustakaan. Di mana teknik ini merupakan suatu studi yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data dengan adanya bantuan dari berbagai macam sumber seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, artikel, serta jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Teknik ini dilakukan secara sistematis untuk

memperoleh, mengumpulkan, mengolah, serta menyimpulkan data-data yang di dapat untuk menyelesaikan topik permasalahan yang dibahas (Sari & Asmendri, 2020).

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian berfokus pada data antara tahun 2020-2023 dengan beberapa alasan, yaitu pada tahun 2020 muncul kembali keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Keinginan Ukraina tersebut yang menimbulkan konflik antara Rusia dan Ukraina hingga tahun 2023, yang membuat Amerika Serikat memberikan embargo ke Rusia.

H. Sistematika Penulisan

Laporan riet ini ditulis dalam tiga bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi, hipotesa, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisi mengenai penyebab konflik Rusia-Ukraina tahun 2022, hingga penyebab serta kebijakan embargo yang diberikan Amerika Serikat kepada Rusia.

BAB III merupakan bab yang berisi mengenai strategi Rusia dalam menghadapi embargo dari Amerika Serikat, serta menghubungkan dengan teori politik luar negeri, dan teori aliansi.

BAB IV merupakan bab penutup mengenai hasil akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan yang terdiri dari temuan penting dari riset ini, kontribusi riset ini terhadap perkembangan ilmu HI, dan keterbatasan riset serta rekomendasi riset selanjutnya.